

# ANALISIS KETERKAITAN SEKTOR KEHUTANAN DENGAN SEKTOR PEREKONOMIAN LAINNYA DI INDONESIA (*Analysis of Forestry Sector Linkages with Other economics Sectors in Indonesia*)

Oleh/by:  
Nur Arifatul Ulya

## ABSTRACT

*The role of forestry sector in relation with other the economics sectors and its position in economy needs to be studied by identifying the linkages in the production process. Comparison of time series Input Output Tables were used to identify linkages of forestry sector with other economics sectors and to identify the position of forestry sector in the economy. The research result indicates that linkages of forestry sector with the other economic sectors have fluctuated by time. In addition, forestry sector is not prominent sector in the Indonesian economy.*

*Keywords : backward linkages, forward linkages, forestry sector, Input Output Table*

## ABSTRAK

Peranan sector kehutanan dalam kaitannya dengan sektor-sektor perekonomian dan posisinya dalam perekonomian perlu dikaji dengan melihat keterkaitan antar sektor dalam proses produksi. Dengan menggunakan Tabel Input Output yang dibandingkan dari waktu ke waktu, perkembangan keterkaitannya sektor kehutanan dengan sektor perekonomian dan posisinya dalam perekonomian dapat diketahui. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterkaitan sektor kehutanan dengan sektor perekonomian lainnya berfluktuasi dari waktu ke waktu, sektor kehutanan bukan merupakan sektor unggulan dalam perekonomian Indonesia.

Kata kunci : Keterkaitan ke belakang, keterkaitan ke depan, sektor kehutanan, Tabel input Output

## I. PENDAHULUAN

Sumber daya hutan telah menjadi modal utama pembangunan ekonomi nasional dalam tiga dasawarsa terakhir ini, dan memberi dampak positif bagi peningkatan penerimaan pemerintah, penyerapan tenaga kerja dan mendorong pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi. Kontribusi sektor kehutanan dalam penerimaan devisa pada tahun 1992-1997 tercatat sebesar US\$ 16,0 milyar, atau sekitar 3,5 persen dari PDB nasional (Badan Pusat Statistik, 2000). Meskipun kontribusi sektor kehutanan terhadap total nilai tambah nasional (Produk Domestik Bruto) menurun dari 4,3 persen pada tahun 1993 menjadi 2,3 persen pada tahun 2002, namun nilai tambahnya meningkat dari Rp. 14,1 triliun menjadi Rp. 36,2 triliun (Badan Pusat Statistik, 2003).

---

<sup>1)</sup>Peneliti pada Balai Penelitian Kehutanan Palembang, Jl. Kol. H. Burlian KM. 6,5 Pundi Kayu Palembang, e-mail : nur\_arifa@yahoo.com

Penyerapan tenaga kerja, sektor kehutanan pada tahun 1980 mampu menampung sekitar 113 ribu orang, dan menjadi sekitar 179 ribu orang pada tahun 1985. Pada tahun 1990 jumlah tenaga kerja sektor kehutanan ini sebesar 285 ribu orang dan mencapai puncaknya pada tahun 1997, yaitu sebanyak 388 ribu orang. Pada tahun 2000, penyerapan tenaga kerja sektor kehutanan mulai dari penanaman, pemanfaatan sampai dengan industri tercatat 3.092.470 orang, dengan rata-rata pendapatan pekerja di HPH sebesar Rp. 7,3 juta/tahun/orang, dan untuk di industri Rp. 3,3 juta/tahun/orang (Simangunsong, 2004).

Data BPS tahun 2000 menunjukkan sekitar 100 juta orang bergantung pada hasil hutan, baik dalam bentuk barang, jasa maupun penghasilan. Paling tidak sepertiga dari penduduk perdesaan bergantung pada ketersediaan bahan kayu bakar, tanaman obat, makanan, pupuk organik dari sampah hutan, yang sekaligus sebagai sumber penghasilan (Vitalaya, 2004).

Pembangunan kehutanan sejauh ini juga memiliki kontribusi yang besar terhadap pembangunan wilayah. Hal ini ditunjukkan dengan terbukanya wilayah-wilayah terpencil melalui ketersediaan jalan HPH bagi masyarakat di dalam dan sekitar hutan, bertambahnya kesempatan kerja, dan peningkatan pendapatan pemerintah daerah dan masyarakat.

Namun demikian, informasi dan data yang ada belum memberikan gambaran yang jelas tentang peran sektor kehutanan dalam keterkaitannya dengan sektor-sektor ekonomi lain. Selama ini kajian yang dilakukan lebih terfokus pada peranan sektor secara parsial. Padahal dalam proses produksi ada keterkaitan antara output dari sektor kehutanan dan input dari sektor-sektor ekonomi lainnya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk :

- a. Mengetahui tingkat keterkaitan ke depan (*forward linkages*) sektor kehutanan dengan sektor-sektor ekonomi lainnya dari waktu ke waktu.
- b. Mengetahui tingkat keterkaitan ke belakang (*backward linkages*) sektor kehutanan dengan sektor-sektor ekonomi lainnya dari waktu ke waktu.
- c. Mengetahui posisi sektor kehutanan dalam perekonomian.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai dasar dalam menentukan arah kebijakan sektor kehutanan berdasarkan keterkaitan sektor kehutanan dengan sektor perekonomian lainnya.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan model transaksi input output. Melalui transaksi antar sektor baik dalam bentuk input maupun output dalam proses produksi, dapat terlihat keterkaitan antara sektor kehutanan dengan sektor ekonomi lainnya. Data yang digunakan adalah data Tabel Transaksi Input-Output (I-O) Indonesia tahun 1971 sampai dengan tahun 2003. Matriks tabel IO yang digunakan adalah matriks 19 x 19 sektor.

Sektor kehutanan yang dimaksud dalam tabel IO merupakan hasil-hasil dari kehutanan yaitu, segala jenis kayu tebangan seperti kayu jati, kayu rimba, dan hasil hutan lainnya seperti rotan, kayu bakar, arang, air dan madu. Termasuk juga kayu/bambu dari kebun.

### A. Konsepsi Tabel Input Output

Tabel I-O adalah system informasi statistik yang disusun dalam bentuk matriks yang

menggambarkan transaksi barang dan jasa antar sektor-sektor ekonomi. Aspek yang ingin ditonjolkan oleh tabel I-O adalah bahwa setiap sektor mempunyai keterkaitan/ ketergantungan dengan sektor lain. Besarnya ketergantungan suatu sektor ditentukan oleh besarnya input yang digunakan dalam proses produksinya. Sasaran pengembangan suatu sektor tidak akan tercapai tanpa dukungan input yang memadai dari sektor lain, sehingga perencanaan suatu sektor harus pula memperhatikan prospek pengembangan sektor-sektor terkait secara terintegrasi. Ilustrasi sederhana suatu sistem ekonomi menjadi tiga sektor produksi disajikan pada tabel 1.

Tabel 1. Kerangka Dasar Tabel Input Output

Susunan Input	Alokasi Output			Permintaan Antara			Permintaan	Jumlah
				Sektor Produksi			Akhir	Output
		1	2	3				
Sektor Produksi	1	$X_{11}$	$X_{12}$	$X_{13}$	$F_1$			$X_1$
	2	$X_{21}$	$X_{22}$	$X_{23}$	$F_2$			$X_2$
	3	$X_{31}$	$X_{32}$	$X_{33}$	$F_3$			$X_3$
Jumlah Input		$V_1$	$V_2$	$V_3$				
Primer								
Jumlah Input		$X_1$	$X_2$	$X_3$				

Sumber : Badan Pusat Statistik (2000)

Isian-isian angka pada garis horizontal atau baris memperlihatkan bagaimana output suatu sektor dialokasikan, sebagian untuk memenuhi permintaan antara (*intermediate demand*) dan sebagian lagi dipakai untuk memenuhi permintaan akhir (*final demand*). Permintaan antara adalah permintaan terhadap barang dan jasa yang digunakan untuk proses lebih lanjut pada sektor produksi. Permintaan akhir adalah permintaan untuk konsumsi akhir yang terdiri dari konsumsi rumah tangga, pemerintah, pembentukan modal dan ekspor.

Isian angka menurut garis vertikal atau kolom, menunjukkan pemakaian input antara maupun input primer yang disediakan oleh sektor-sektor lain untuk pelaksanaan produksi. Input primer dalam istilah yang lebih populer disebut nilai tambah, yang terdiri dari upah/gaji, sewa tanah, bunga netto dan surplus usaha.

## B. Metode Analisis

Pendekatan yang digunakan untuk mengetahui keterkaitan sektor kehutanan terhadap sektor lainnya melalui analisis sisi penawaran yang meliputi analisis keterkaitan (*linkages analysis*) baik keterkaitan ke belakang (*backward linkages*) maupun keterkaitan ke depan (*forward linkages*). Selain itu juga dilakukan analisis indeks derajat kepekaan dan indeks daya penyebaran untuk mengetahui posisi sektor kehutanan dalam perekonomian.

### 1. Analisis Keterkaitan ke Depan

Analisis ini digunakan untuk melihat dampak yang terjadi terhadap output suatu sektor sebagai akibat dari perubahan permintaan akhir pada masing-masing sektor perekonomian.

Besaran ini menjelaskan pembentukan output di suatu sektor yang dipengaruhi oleh permintaan akhir di masing-masing sektor perekonomian. Keterkaitan ke depan disebut juga derajat kepekaan.

Keterkaitan ke depan berhubungan dengan penjualan barang jadi/output. Sebagai contoh, output sektor kehutanan digunakan sebagai input oleh sektor lain seperti industri kehutanan, industri manufaktur dan bangunan. Perubahan permintaan akhir pada masing-masing sektor yang menggunakan output sektor kehutanan sebagai input akan berdampak pada output dari sektor kehutanan.

## 2. Analisis Keterkaitan ke Belakang

Analisis ini digunakan untuk melihat dampak dari perubahan permintaan akhir suatu sektor terhadap output seluruh sektor ekonomi di suatu wilayah. Keterkaitan ke belakang disebut juga daya penyebaran.

Keterkaitan ke belakang berhubungan dengan bahan mentah atau bahan baku. Sebagai contoh, untuk menghasilkan output sektor kehutanan memerlukan input dari sektor industri (alat berat), bangunan, transportasi dan komunikasi. Perubahan permintaan akhir untuk sektor kehutanan akan berdampak pada output sektor industri, bangunan dan transportasi.

## 3. Indeks Derajat Kepekaan dan Indeks Daya Penyebaran

Terdapat dua ukuran indeks untuk melihat keterkaitan ke depan dan ke belakang dari suatu sektor dalam perekonomian, yaitu melalui: (1) daya penyebaran (*power of dispersion*), dan (2) derajat kepekaan (*sensitivity of dispersion*). Dengan indeks ini kita bisa melakukan perbandingan besarnya derajat keterkaitan antar sektor, yang nantinya bisa digunakan untuk menentukan sektor yang dapat dijadikan sektor kunci.

Indeks derajat kepekaan menjelaskan dampak yang terjadi pada suatu sektor sebagai akibat dari perubahan permintaan akhir pada masing-masing sektor perekonomian. Untuk mengetahui indeks derajat kepekaan sektor I dalam perekonomian digunakan rumus:

$$\beta_i = \frac{\sum_j b_{ij}}{\left(\frac{1}{n}\right) \sum_i \sum_j b_{ij}}$$

Di mana:

$\beta_i$  = indeks derajat kepekaan sektor i dalam perekonomian

$b_{ij}$  = elemen pada matriks invers Leontief

Nilai  $\beta_i > 1$  menunjukkan bahwa indeks derajat kepekaan sektor i lebih tinggi dari rata-rata indeks derajat kepekaan seluruh sektor. Sedangkan  $\beta_i < 1$  menunjukkan derajat kepekaan sektor i lebih rendah dari rata-rata. Indeks derajat kepekaan disebut juga sebagai tingkat dampak keterkaitan ke depan (*forward linkages effect ratio*). Jika nilai indeks derajat kepekaan lebih dari 1 berarti sektor tersebut merupakan sektor kunci karena secara relatif ia dapat memenuhi permintaan akhir sebanyak di atas kemampuan rata-rata dari sektor lainnya (BPS, 2000).

Indeks daya penyebaran menunjukkan dampak dari perubahan permintaan akhir suatu sektor terhadap output seluruh sektor ekonomi di suatu wilayah atau

negara. Rumus untuk mengukur daya penyebaran sektor ke-j adalah:

$$\alpha_j = \frac{\sum_i b_{ij}}{\left(\frac{1}{n}\right) \sum_i \sum_j b_{ij}}$$

Di mana:

$\alpha_j$  = indeks daya penyebaran sektor ke j dalam perekonomian

$b_{ij}$  = elemen pada matriks invers Leontief

Nilai  $\alpha_j > 1$  menunjukkan indeks daya penyebaran sektor j berada di atas rata-rata daya penyebaran seluruh sektor ekonomi. Indeks daya penyebaran disebut juga sebagai tingkat dampak keterkaitan ke belakang (*backward linkages effect ratio*) (BPS, 2000). Apabila nilai daya penyebaran sektor j lebih dari 1 berarti secara relatif permintaan akhir sektor j dalam mendorong pertumbuhan produksi lebih besar dari rata-rata, sehingga sektor ini merupakan sektor kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi (BPS, 2000).

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis keterkaitan sektor kehutanan dalam perekonomian Indonesia dibagi menjadi 2 (dua) yaitu analisis keterkaitan ke belakang (*backward linkages*) dan keterkaitan ke depan (*forward linkages*).

#### A. Analisis Keterkaitan Ke Depan Sektor Kehutanan Indonesia

##### 1. Nilai Keterkaitan Ke Depan Sektor Kehutanan Indonesia

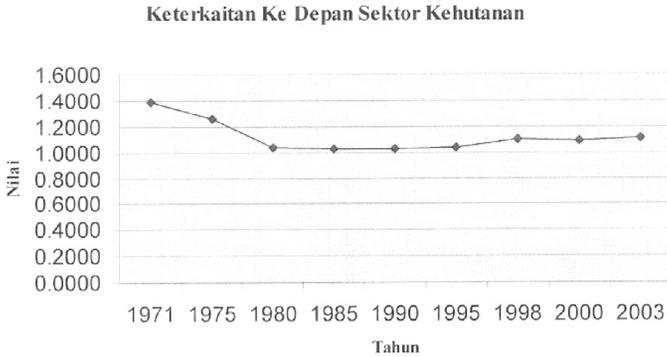
Nilai keterkaitan ke depan (*forward linkages*) sektor kehutanan menunjukkan daya kepekaan sektor kehutanan terhadap kenaikan permintaan akhir sektor-sektor perekonomian lainnya. Nilai keterkaitan ke depan dari sektor kehutanan dari tahun 1971 sampai 2003 disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Nilai Keterkaitan ke Depan Sektor Kehutanan

Tahun	Keterkaitan ke Depan ( <i>forward Linkages</i> )
1971	1,3846
1975	1,2620
1980	1,0402
1985	1,0272
1990	1,0294
1995	1,0371
1998	1,1044
2000	1,0924
2003	1,1077

Sumber : Pengolahan Data Tabel Input Output

Tabel 2 menunjukkan bahwa nilai keterkaitan ke depan sektor kehutanan pada tahun 1971 adalah 1,3846. Artinya kenaikan 1 milyar rupiah permintaan akhir sektor-sektor perekonomian menyebabkan output sektor kehutanan meningkat sebesar 1,3846 milyar rupiah. Demikian juga untuk tahun-tahun lainnya. Sedang gambaran trendnya dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Trend Nilai Keterkaitan ke Depan Sektor Kehutanan

Nilai keterkaitan ke depan sektor kehutanan yang terbesar terjadi pada tahun 1971, yaitu sebesar 1,3946. Hal ini diduga terjadi karena pada awal 1970-an pemerintah menjadikan sektor kehutanan dan pertambangan sebagai pilar utama penopang ekspor dan pertumbuhan ekonomi. Pada saat itu sektor kehutanan dengan beragam produknya menjadi sektor utama dalam mengejar penerimaan negara untuk membiayai pembangunan (Tambunan, 2005). Hal ini didukung dengan adanya kebijakan pemerintah untuk mengadaptasi strategi industrialisasi yang bersifat substitusi impor berbasis sumberdaya alam (Wie, 2004). Kondisi ini menyebabkan output sektor kehutanan banyak digunakan sebagai input oleh sektor-sektor perekonomian lainnya yang menyebabkan tingginya nilai keterkaitan ke depan sektor kehutanan.

Nilai *forward linkages* sektor kehutanan yang terkecil terjadi pada tahun 1985. Hal ini kemungkinan terjadi berkaitan dengan adanya perubahan titik berat Pembangunan Lima Tahun dari pembangunan berbasis pertanian menjadi penciptaan lapangan kerja baru dan industri.

Nilai *forward linkages* mengalami penurunan dari 1971 ke 1975, 1975 ke 1980, 1980 ke 1985 dan tahun 1998 ke 2000. Pada periode 1971 ke 1980, penurunan *forward linkages* sektor kehutanan kemungkinan disebabkan oleh adanya "boom minyak" pada tahun 1974 yang dibuktikan dengan kenaikan pajak migas yang cukup tajam dalam penerimaan total pemerintah dari 29 persen (1973/1974) menjadi 49 persen pada periode 1974/1975 (Wie, 2004). Dengan demikian penerimaan dari sektor migas lebih berperan dalam perekonomian. Hal ini diduga menyebabkan turunnya dampak perubahan permintaan akhir sektor-sektor perekonomian terhadap output sektor kehutanan.

Penurunan *forward linkages* sektor kehutanan juga terjadi pada periode 1980 ke 1985. Hal ini kemungkinan berkaitan dengan beralihnya prioritas pembangunan dari berbasis pertanian ke arah industri manufaktur, sehingga *forward linkages* sektor kehutanan juga mengalami penurunan sebagai akibat menurunnya permintaan terhadap output sektor

kehutanan dari sektor-sektor perekonomian lainnya seiring perkembangan sektor industri manufaktur.

Nilai *forward linkages* sektor kehutanan kembali mengalami penurunan pada periode 1998 ke 2000. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh belum pulihnya kondisi perekonomian secara umum, sehingga permintaan sektor lain terhadap output sektor kehutanan cenderung mengalami penurunan.

Nilai *forward linkages* sektor kehutanan meningkat pada periode 1985-1990, 1990-1995, 1995-1998 dan 2000-2003. Kenaikan *forward linkages* sektor kehutanan pada periode 1985-1990 diduga berkaitan erat dengan mulai berkembangnya industri kehutanan. Hal ini terjadi antara lain sebagai dampak dari pelarangan ekspor kayu bulat yang dilakukan bertahap dari 1980 sampai 1985. Adapun dampak kebijakan ini adalah untuk pengembangan industri kayu di dalam negeri, yaitu :

- a. Meningkatkan devisa dari ekspor kayu olahan
- b. Memperluas kesempatan kerja di bidang industri hasil hutan
- c. Meningkatkan nilai tambah
- d. Memacu perkembangan ekonomi regional

Kebijakan ini akhirnya mewujudkan Indonesia sebagai eksportir utama kayu olahan, yang digunakan sebagai bahan baku sektor ekonomi lainnya (Simangunsong, 2004). Sehingga *forward linkages* sektor kehutanan mengalami peningkatan.

Pada periode 1995-1998 kenaikan *forward linkages* sektor kehutanan lebih dipicu oleh krisis ekonomi yang terjadi pada 1997/1998. Krisis ekonomi menyebabkan industri manufaktur di Indonesia "kolaps" karena merosotnya nilai rupiah menyebabkan mahalnya bahan baku dan biaya produksi. Di sisi lain, sektor pertanian pada umumnya, termasuk di dalamnya sektor kehutanan yang dapat memenuhi bahan baku dari dalam negeri relatif cukup stabil. Dengan demikian sedikit saja terjadi perubahan permintaan akhir sektor perekonomian lainnya menyebabkan kenaikan output sektor kehutanan meningkat dengan tajam.

Kenaikan *forward linkages* pada periode 2000-2003 diduga disebabkan oleh mulai pulihnya kondisi perekonomian secara umum. Hal ini menyebabkan terjadinya peningkatan permintaan dari sektor perekonomian lain terhadap output sektor kehutanan, sehingga *forward linkages* sektor kehutanan mengalami peningkatan.

## 2. Derajat Kepekaan Sektor Kehutanan Indonesia

Derajat kepekaan (*forward linkages effect ratio*) sektor kehutanan menunjukkan posisi sektor kehutanan dalam perekonomian, dalam artian pentingnya peranan suatu sektor dalam perekonomian. Nilai derajat kepekaan dari sektor kehutanan dari tahun 1971 sampai 2003 disajikan pada Tabel 3.

Nilai derajat kepekaan sektor kehutanan dari tahun 1971 sampai 2003 selalu berada di bawah 1 (kurang dari 1), berarti sektor kehutanan kurang strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya sektor kehutanan bukanlah sektor kunci dalam perekonomian Indonesia. Hal ini yang diperkuat oleh Ramli dan Akhmad (1993) yang menyatakan bahwa bagi penciptaan pendapatan domestik, selama periode 1983 sampai 1989 kontribusi sektor kehutanan hanya 1% total GDP Indonesia (harga konstan 1983). Aktivitas sektor kehutanan ternyata hanya menyumbang 4 sampai 5 % total nilai tambah yang dihasilkan sektor pertanian. Pertumbuhan sektor kehutanan juga hanya 1,4%, jauh dibawah pertumbuhan keseluruhan sektor pertanian (3,8% per tahun) dan keseluruhan PDB (5,5%).

Tabel 3. Derajat kepekaan sektor kehutanan

Tahun	Derajat Kepekaan
1971	0.8086
1975	0.8041
1980	0.8132
1985	0.7990
1990	0.8362
1995	0.8302
1998	0.8768
2000	0.7111
2003	0.6203

Sumber : Pengolahan Data Tabel Input Output

## B. Analisis Keterkaitan ke Belakang Sektor Kehutanan Indonesia

### 1. Nilai Keterkaitan ke Belakang Sektor Kehutanan Indonesia

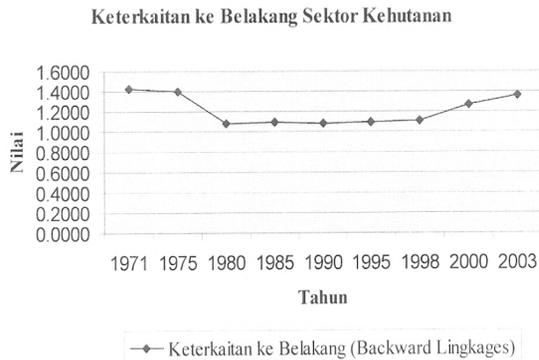
Nilai keterkaitan ke belakang (*backward linkages*) sektor kehutanan menggambarkan dampak kenaikan 1 unit permintaan akhir sektor kehutanan terhadap perubahan output perekonomian. Nilai *backward linkages* sektor kehutanan dari tahun 1971 sampai tahun 2003 disajikan dalam Tabel 4.

Tabel 4. Nilai Keterkaitan ke Belakang Sektor Kehutanan

Tahun	Keterkaitan ke Belakang
1971	1,4326
1975	1,4035
1980	1,0754
1985	1,0933
1990	1,0826
1995	1,0984
1998	1,1005
2000	1,2680
2003	1,3635

Sumber : Pengolahan Data Tabel Input Output

Nilai *backward linkages* sektor kehutanan Indonesia pada tahun 1971 adalah 1,4326. Artinya jika terjadi kenaikan 1 milyar rupiah permintaan akhir sektor kehutanan akan menyebabkan kenaikan output perekonomian sebesar 1,4326 milyar rupiah. Demikian juga untuk tahun-tahun selanjutnya. Gambaran trendnya disajikan pada Gambar 2.



Gambar 2. Trend Nilai Keterkaitan ke Depan Sektor Kehutanan

Nilai *backward linkages* terbesar dari sektor kehutanan terjadi pada tahun 1971, yaitu sebesar 1,4326. Hal ini diduga terjadi karena perekonomian masih sangat tergantung pada sumberdaya alam seperti kehutanan dan migas (Tambunan, 2005). Sehingga jika terjadi perubahan 1 unit permintaan akhir terhadap sektor kehutanan akan sangat besar dampaknya terhadap perubahan output perekonomian.

Nilai *backward linkages* sektor kehutanan paling kecil terjadi pada tahun 1980. Kecilnya nilai *backward linkages* ini diduga disebabkan oleh mulai adanya pelarangan ekspor kayu bulat, sedangkan industri berbasis kehutanan belum tumbuh. Sehingga sektor kehutanan sedikit menggunakan output akhir maupun intermediate output dari sektor perekonomian lainnya.

*Backward linkages* sektor kehutanan mengalami peningkatan pada periode 1980-1985, 1990-1995, 1995-1998, 1998-2000 dan 2000-2003. Pada periode 1980-1985 peningkatan *backward linkages* sektor kehutanan diduga terjadi karena sektor kehutanan mulai tumbuh sehingga memerlukan input dari sektor perekonomian lainnya. Pada periode 1990-1995, 1995-1998, 1998-2000 dan 2000-2003 juga diduga karena peningkatan output sektor kehutanan yang membutuhkan dukungan input dari sektor perekonomian lainnya.

Nilai *backward linkages* sektor kehutanan mengalami penurunan pada periode 1971-1975, 1975-1980 dan 1985-1990. Pada periode 1971-1975 dan 1975-1980 penurunan *backward linkages* sektor kehutanan diduga terjadi karena terjadinya boom minyak. Sehingga perekonomian lebih bertumpu pada sektor migas. Pada periode 1985-1990 meskipun sektor kehutanan berkembang pesat, tetapi sektor industri juga mengalami perkembangan pesat, sehingga output sektor perekonomian lebih banyak digunakan untuk input sektor industri manufaktur yang memerlukan input lebih beragam.

## 2. Daya Penyebaran Sektor Kehutanan Indonesia

Jika dilihat dari nilai daya penyebaran sektor kehutanan (Tabel 5), dari tahun 1971 sampai tahun 2003, nilai daya penyebaran sektor kehutanan selalu berada di bawah 1, sehingga dapat diketahui bahwa sebenarnya sektor kehutanan bukan sektor strategis dalam

perekonomian. Jadi sektor kehutanan bukan merupakan sektor strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Tabel 5. Daya Penyebaran Sektor Kehutanan

Tahun	Daya Penyebaran
1971	0.8469
1975	0.8942
1980	0.8407
1985	0.8504
1990	0.8795
1995	0.8793
1998	0.8737
2000	0.8254
2003	0.7635

Sumber : Pengolahan Data Tabel Input Output

Dari tabel 3 dan tabel 5 dapat dilihat derajat kepekaan maupun daya penyebaran sektor kehutanan dari tahun 1971 sampai 2003 selalu berada di bawah 1 (kurang dari 1), berarti sektor kehutanan kurang strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Jika dikembalikan pada pengertian dari sektor kehutanan, sebenarnya hal ini merupakan sesuatu yang wajar. Menurut pengertiannya, sektor kehutanan merupakan hasil-hasil dari kehutanan antara lain, segala jenis kayu tebangan seperti kayu jati, kayu rimba, dan hasil hutan lainnya seperti rotan, kayu bakar, arang, air, madu dan lain-lain, termasuk juga kayu/bambu dari kebun.

Saat ini yang digalakkan pemerintah dalam rangka mendukung perekonomian adalah adanya nilai tambah produk melalui industri kehutanan, sehingga yang dihasilkan bukan barang mentah. Selain itu, dengan semakin berkurangnya kawasan hutan produktif, maka output sektor kehutanan juga akan semakin berkurang. Apabila dibandingkan dengan sektor perekonomian lainnya baik di dalam maupun di luar rumpun pertanian kemampuan memenuhi permintaan akhir maupun mendorong pertumbuhan produksi dari sektor kehutanan nilainya kecil dan cenderung menurun.

Usaha yang dapat dilakukan untuk menjadikan sektor kehutanan strategis dalam perekonomian antara lain adalah dengan meningkatkan efisiensi sektor kehutanan, meningkatkan ketersediaan bahan baku dengan cara meningkatkan luas kawasan hutan produktif dan meningkatkan kualitas produk (hasil hutan) sehingga mempunyai *comparative advantages* yang tidak dimiliki oleh produk substitusinya.

#### IV. KESIMPULAN

1. Nilai keterkaitan kedepan sektor kehutanan Indonesia berfluktuasi dari waktu ke waktu dengan dipengaruhi kondisi perekonomian Indonesia secara umum. Nilai keterkaitan ke depan sektor kehutanan yang terbesar terjadi pada tahun 1971 (1,3946) sedangkan nilai terkecil terjadipada tahun 1985 (1,0272).
2. Nilai keterkaitan ke belakang sektor kehutanan Indonesia berfluktuasi dari waktu ke waktu dengan dipengaruhi kondisi perekonomian Indonesia secara umum. Nilai *backward linkages* terbesar dari sektor kehutanan teljadi pada tahun 1971 (1,4326) sedangkan nilai terkecil terjadi pada tahun 1980 (1,0754).

3. Sektor kehutanan bukan merupakan sektor kunci dalam perekonomian Indonesia jika dilihat dari derajat kepekaan dan daya penyebaran.

## V. IMPLIKASI KEBIJAKAN

Sektor Kehutanan yang dimaksud dalam Tabel 10 merupakan hasil-hasil dari kehutanan yaitu, segala jenis kayu tebangan seperti kayu jati, kayu rimba, dan hasil hutan lainnya seperti rotan, kayu bakar, arang, air dan madu. Termasuk juga kayu/bambu dari kebun. Sektor kehutanan Indonesia secara umum mempunyai nilai keterkaitan ke depan lebih besar dari keterkaitan ke belakang. Di sisi lain sektor kehutanan kurang strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi ditinjau dari derajat kepekaan dan daya penyebaran.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sektor kehutanan kurang strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi tetapi dalam proses produksi output sektor kehutanan banyak dipergunakan oleh sektor perekonomian lainnya. Bahkan karakter hasil hutan yang unik dapat dinyatakan sebagai dapat diperbarui tetapi tidak tergantikan, dalam artian meskipun dalam proses produksi ada substitusinya tetapi barang substitusi tersebut tidak akan mampu menggantikan semua karakternya secara sempurna. Departemen Kehutanan dapat mendorong peran sektor kehutanan dalam kaitannya dengan proses produksi melalui kegiatan pembangunan hutan yang merupakan "pabrik" dari output sektor kehutanan. Kegiatan pembangunan hutan harus mampu menghasilkan hutan siap panen dengan volume tinggi. Hutan dengan kondisi demikian hanya dapat dicapai melalui kegiatan pengelolaan yang matang mulai dari kegiatan perencanaan, budidaya sampai pemanenan.

### Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik. 1992. Tabel Input Output Indonesia 1990. Badan Pusat Statistik. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 1997. Tabel Input Output Indonesia 1995. Badan Pusat Statistik. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2000. Tabel Input Output Indonesia 1998. Badan Pusat Statistik. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2000. Kerangka Teori dan Analisis Tabel Input Output. Badan Pusat Statistik. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2000. Statistik Indonesia 1999. Badan Pusat Statistik. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2002. Tabel Input Output Indonesia 2000. Badan Pusat Statistik. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2003. Statistik Indonesia 2002. Badan Pusat Statistik. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2005. Tabel Input Output Indonesia 2003. Badan Pusat Statistik. Jakarta.

- Biro Pusat Statistik. 1973. Tabel Input Output Indonesia 1971. Biro Pusat Statistik. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 1977. Tabel Input Output Indonesia 1975. Biro Pusat Statistik. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 1982. Tabel Input Output Indonesia 1980. Biro Pusat Statistik. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 1987. Tabel Input Output Indonesia 1985. Biro Pusat Statistik. Jakarta.
- Ramli, R. dan M. Akhmad. 1993 Rente ekonomi Pengusahaan Hutan Indonesia. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Jakarta
- Simangunsong, B.C.H. 2004. The Ecnomic Performance of Indonesia's Forestry Sector in The Period 1980-2002. Brefing Paper#4. GT'Z-\SMCP. Jakarta
- Tambunan, M. 2005. Restrukturisasi Industri Kehutanan menuju Industri Hutan Berbasis IKM di Indonesia. Jurnal Kebijakan Ekonomi Vol 1 No. 1, Agustus 2005. MPKP-FEUI, Depok.
- Vitalaya, A. 2004. Pemiskinan Masyarakat Sekitas Hutan. Makalah pada Sarasehan dan Kongres LEI menuju CBO, Sertifikasi di Persimpangan Jalan : politik Perdagangan, Kelestarian dan Pemberantasan Kemiskinan. Jakarta
- Wie, T.K. 2004. Pembangaunan, Kebebasan dan "Mukjizat" Orde Baru. Penerbit Buku Kompas. Jakarta